

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **1.1 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur terdahulu terkait fenomena partisipasi politik kelompok seniman sebagai bahan acuan untuk menentukan batasan penelitian, posisi peneliti dan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Sudah cukup banyak penelitian yang membahas soal partisipasi politik di Indonesia, namun yang membahas soal partisipasi politik kelompok seniman masih jarang dilakukan. Secara umum banyak dari penelitian-penelitian tentang partisipasi politik dilakukan dengan cara menganalisis bentuk partisipasi politik masyarakat dalam momen atau situasi politik tertentu seperti pada Pemilihan Umum baik di level pusat maupun daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yustiningrum dan Ichwanuddin (2014) yang berjudul *Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014*, menjelaskan tentang kecenderungan partisipasi politik dan perilaku pemilih pada Pemilu 2014. Untuk mengetahui kecenderungan partisipasi politik pemilih dan perilaku pemilih pada penelitiannya, Yustiningrum dan Ichwanudin menganalisis menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Penelitian ini juga menjelaskan tentang faktor apa yang paling mempengaruhi kecenderungan partisipasi politik pemilih dan perilaku pemilih pada Pemilu 2014.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kecenderungan partisipasi politik pemilih dan perilaku pemilih pada Pemilu 2014 adalah faktor pilihan rasional. Banyak dari pemilih pada saat itu menyadari bahwa faktor rasional/ekonomi menjadi pendorong utama kecenderungan partisipasi politik dan perilaku memilih mereka. Faktor rasional ekonomi dalam hal tersebut adalah pemenuhan akan kebutuhan ekonomi pemilih yang kemudian menjadi isu yang sering dikampanyekan oleh para kandidat legislatif dan partai politik yang mengikuti Pemilu 2014, sehingga dapat membangun kedekatan dengan pemilihnya atau dalam hal ini mendorong pemilih untuk berpartisipasi dalam politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Street, Hague dan Savigny (2007) yang berjudul *Playing to the Crowd: The Role of Music and Musicians in Political Participation*, menjelaskan dan menawarkan tentang konsep lain dari partisipasi politik yang mana melibatkan peran seniman melalui kegiatan musik. Street, dkk (2007) mengambil contoh bagaimana peran seniman musik pada konser Rock Against Racism (RAR) yang dilakukan di Inggris pada tahun 1976 dan From Jubilee 2000 to Live 8 pada tahun 1996. Konser RAR dan From Jubilee 2000 to Live 8 merupakan bentuk partisipasi politik seniman di Inggris yang dilakukan melalui gerakan aktivisme untuk menolak rasisme yang terjadi di Inggris pada saat itu. Street, dkk menjelaskan bahwa untuk melihat peran yang dilakukan seniman melalui musik dalam politik mengacu pada dua contoh kasus di atas, melalui tiga cara yaitu organisasi, legitimasi dan tindakan. Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana para musisi melakukan konsolidasi atau

kerjasama dengan kelompok-kelompok tertentu seperti aktivis atau organisasi yang menyuarakan hal serupa. Kemudian legitimasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana para musisi tersebut diakui bukan hanya terkait popularitas mereka namun terkait pesan yang mereka sampaikan diakui atau diakomodasi oleh media. Terakhir adalah tindakan yang mana dalam hal ini para musisi membawakan pesan yang mereka sampaikan melalui lirik lagu yang mereka buat kepada pendengarnya. Hal tersebutlah yang menurut Street, dkk sebagai peran seniman melalui musik dalam politik atau dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik seniman melalui musik.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Afriady (2015) yang berjudul *Partisipasi Seniman Kota Banda Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, menjelaskan tentang bagaimana seniman di Kota Banda Aceh ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2014 dengan berbagai bentuk seperti datang langsung ke tempat pemungutan suara, ikut dalam proses kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan ikut berbicara atau mendiskusikan soal politik. Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Afriady (2015) menjelaskan ada beberapa seniman yang ikut langsung memilih ke tempat pemungutan suara yaitu pimpinan Sanggar Seni Rampagoe dan pimpinan Sanggar Seni Geunaseh. Sementara seniman yang ikut dalam proses kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu Legislatif Kota Banda Aceh 2014 adalah Komunitas Drummer dan Perkusi Aceh (KODA). Kemudian, seniman yang sering berpartisipasi dalam politik dengan bentuk berbicara soal politik yaitu pimpinan Sanggar Seni Bur'am.

Penelitian lain yang juga membahas tentang partisipasi politik seniman dilakukan oleh Zulpandi (2017). Penelitian tersebut berjudul *Voluntarisme Kaum Seniman (Studi Kasus: Seniman Folk Mataram Institute (FMI) dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014)*. Penelitian yang dilakukan oleh Zulpandi menjelaskan bahwa voluntarisme merupakan studi yang erat kaitannya dengan partisipasi politik, dimana voluntarisme merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat (FMI), memberikan dukungan kepada salah satu Calon Presiden yaitu Jokowi-Jk dengan sukarela. Hasil dari penelitian Zulpandi menerangkan bahwa bentuk voluntarisme yang dilakukan oleh FMI kepada pasangan Calon Presiden Jokowi-Jk dengan cara melakukan Kirab Budaya dan Deklarasi Jogja Istimewah untuk Jokowi-Jk, dukungan melalui karya lagu dari salah satu anggota FMI yang berjudul Ayo Lawan dan melakukan kampanye sosial media terhadap pasangan Jokowi-JK yang dilakukan oleh para anggota FMI.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Diteliti**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014, oleh Yustiningrum dan	Tema penelitian; partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat.	Fokus Penelitian sebelumnya; melihat kecenderungan partisipasi politik dan

	Ichwanuddin.		motivasi memilih. Metode Penelitian; menggunakan metode penelitian kuantitatif
2	Playing to the Crowd: The Role of Music and Musicians in Political Participation, oleh Street, Hague dan Savigny (2007).	Tema penelitian; partisipasi politik seniman (musisi) dalam politik.	Fokus penelitian; penelitian terdahulu melihat bagaimana peran dan partisipasi politik senimanditinjau dari beberapa indikator yaitu organisasi, legitimasi dan tindakan mengacu pada kegiatan aktivisme dalam bentuk konser yang dilakukan oleh seniman.
3	Partisipasi Seniman Kota Banda Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, oleh Afriady (2014).	Fokus Penelitian; melihat bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh seniman pada Pemilihan Umum	Lokasi penelitian; penelitian terdahulu dilakukan di Kota Banda Aceh, sementara penelitian terkini dilakukan di

			Kota Palu.
4	Voluntarisme Kaum Seniman (Studi Kasus: Seniman Folk Mataram Institute (FMI) dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014), oleh Zulpandy (2017).	Fokus penelitian; melihat bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh seniman pada Pemilihan Umum	Lokasi Penelitian; penelitian terdahulu dilakukan di Kota Yogyakarta, sementara penelitian terkini dilakukan di Kota Palu

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka dalam penelitian ini akan fokus menganalisis partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok seniman di Kota Palu dalam Pemilu pada 2015. Fokus analisis partisipasi politik seniman dalam penelitian ini kemudian dibagi dalam beberapa bagian seperti bentuk dari partisipasi politik kelompok seniman dan alasan yang mempengaruhi partisipasi politik kelompok seniman Kota Palu.

## 2.2. Kerangka Teori

### 2.2.1. Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1994) dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan partisipasi politik. Dalam buku tersebut, Huntington dan Nelson mengidentifikasi hakikat dari partisipasi politik dengan cara mengelaborasi dua syarat mutlak seorang warga negara dinyatakan berpartisipasi dalam politik. Dua syarat mutlak

tersebut yaitu (1) apakah partisipasi politik hanya berupa perilaku dari warga negara atau (2) termasuk sikap-sikap dan persepsi-persepsi dari warga negara terhadap politik. Sebagai contoh dari dua syarat partisipasi politik secara subjektif yang dielaborasi oleh Huntington dan Nelson tersebut adalah apakah informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah dianggap sebagai partisipasi politik. Kemudian, apakah syarat mutlak dari partisipasi politik warga negara dilihat dari tindakan objektif yang mereka lakukan seperti huru-hara rasial atau pemogokan buruh industri. Atau, hanya kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dan pengambilan keputusan oleh pemerintah dianggap sebagai partisipasi politik. Berdasarkan dua syarat mutlak dari partisipasi politik hasil elaborasi yang dilakukan Huntington dan Nelson (1994) tersebut, maka Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara preman (privat citizen) yang bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Dalam definisi partisipasi politik yang dijelaskan oleh Huntington dan Nelson (1994), ada tiga aspek yang perlu diperhatikan guna mengerti hakikat dari partisipasi politik yang mereka jelaskan. *Pertama*, partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Huntington dan Nelson memisahkan bentuk tindakan politik objektif dari warga negara dan sikap-sikap politik yang subjektif oleh warga negara menjadi dua variabel yang terpisah. *Kedua*, aspek yang menjadi perhatian dalam kajian Huntington dan Nelson adalah kegiatan politik warga negara secara individu atau lebih tepat apa yang disebut

sebagai *privat citizen*. *Ketiga*, adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam bukunya, Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah adalah usaha upaya membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara tertentu. Penjelasan lainnya mengenai kegiatan yang mempengaruhi keputusan pemerintah adalah para individu atau warga negara berusaha menggantikan pengambil-pengambil keputusan pada saat itu dengan orang lainnya yang diharapkan dapat mengakomodasi preferensi-preferensi dan kebutuhan-kebutuhan para warga negara tersebut. *Keempat*, semua kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah entah memiliki efek atau tidak atau dengan kata lain berhasil maupun tidak, termasuk dalam aspek yang harus diperhatikan sebagai partisipasi politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, Huntington dan Nelson kemudian menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya kegiatan yang dilakukan sendiri oleh warga negara, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara tidak atas kehendaknya sendiri. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut atas kendali atau perintah orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah. Pernyataan di atas mengacu pada fenomena partisipasi politik yang terjadi di negara-negara komunis dan berkembang. Partisipasi politik dalam negara tersebut tidak hanya dilakukan secara sukarela, namun partisipasi juga dilakukan secara terpaksa dalam artian dipaksakan secara tersembunyi baik oleh penguasa maupun oleh kelompok lain (Huntington dan Nelson, 1994).

Berdasarkan kenyataan empiris tersebut, Huntington dan Nelson membagi karakter partisipasi politik menjadi dua bagian. *Pertama*, bentuk partisipasi politik yang sukarela merupakan partisipasi yang demokratis dan otonom yang dilakukan oleh warga negara. *Kedua*, bentuk partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi yang diarahkan dan disponsori oleh kelompok tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang partisipasi politik oleh Huntington dan Nelson, maka peneliti mencoba merumuskan dan mengamplikasikan hal tersebut dalam penelitian ini. *Pertama*, partisipasi politik berhubungan dengan hal yang bersifat objektif. Dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seniman dalam politik dan bukan subjektifitas dari para seniman seperti sikap atau orientasi mereka terhadap politik. *Kedua*, warga negara biasa atau dalam penelitian ini adalah seniman yang melaksanakan kegiatan politik secara langsung maupun tidak langsung secara perorang maupun kelompok diklasifikasikan sebagai partisipasi politik. *Ketiga*, tindakan yang dilakukan oleh seniman yang ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah, seperti mengganti pengambil-pengambil keputusan dalam pemerintah yang dianggap mampu atau dapat mengakomodasi kepentingan mereka. *Keempat*, kegiatan yang dilakukan oleh seniman tanpa peduli dampak yang akan timbul baik gagal maupun berhasil, yang terpenting adalah tindakan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah.

### **2.2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara atau dalam istilah yang digunakan oleh Huntington dan Nelson adalah *privat citizen* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Huntington dan Nelson (1994) mengklasifikasikan partisipasi politik menjadi beberapa bentuk.

#### **1. Kegiatan Pemilihan**

Kegiatan pemilihan yang dimaksud adalah segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara yang memberikan pengaruh terhadap hasil proses pemilihan. Hal tersebut seperti ikut langsung dalam proses pemungutan suara, sumbangan untuk kegiatan kampanye, dan lain sebagainya yang terfokus pada siklus pemilihan dan pemungutan suara.

#### **2. Lobbying**

Lobbying adalah tindakan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat pemerintah atau pemimpin-pemimpin politik dengan cara melobi atau menghubungi langsung guna untuk menyampaikan atau menyelesaikan persoalan-persoalan sejumlah besar orang.

#### **3. Kegiatan Organisasi**

Kegiatan organisasi yang dimaksud adalah keterlibatan warga negara dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan

membawa kepentingan warga negara lainnya baik secara khusus tertuju pada kepentingan warga negara tertentu maupun secara kolektif atau kepentingan warga negara secara umum.

#### 4. Mencari Koneksi

Kegiatan mencari koneksi merupakan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pejabat-pejabat pemerintah kepada warga negara baik dalam jumlah kecil maupun besar yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Huntington dan Nelson (1994) dalam kajiannya merujuk pada penjelasan Verva, Nie, dan Kim yang menyimpulkan bahwa "*particularized contacting*" merupakan bentuk partisipasi politik yang terpisah dari bentuk partisipasi politik lainnya.

#### 5. Tindakan Kekerasan

Tindakan kekerasan yang dimaksud dalam hal ini kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pemerintah dengan cara menghasilkan kerugian fisik yang dirasakan oleh orang atau harta benda. Contoh tindakan kekerasan tersebut seperti kekerasan yang ditujukan untuk mengubah pemimpin politik (kudeta, pemberontakan), mempengaruhi kebijakan pemerintah (huruhara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem pemerintahan (revolusi).

Sementara Mas'ood (2008) menjelaskan bahwa ada dua bentuk partisipasi politik berdasarkan yang dikemukakan oleh Almond yaitu partisipasi politik

konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

1. Partisipasi politik konvensional

- a) Pemberian suara atau voting
- b) Diskusi politik
- c) Kegiatan kampanye
- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

2. Partisipasi politik non-konvensional

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Melakukan kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, pembakaran;
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Penjelasan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik juga dipaparkan oleh Kaase dan Marsh (dalam Zulpandy, 2017) yang senada dengan Mas'ood yang membagi partisipasi politik menjadi dua bagian yaitu konvensional dan non-konvensional. Menurut Kaase dan Marsh bentuk konvensional dari partisipasi politik adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negara biasa guna mempengaruhi hasil akhir dari kegiatan politik sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku seperti datang ke tempat pemungutan suara langsung untuk memilih calon untuk menduduki jabatan tertentu atau melakukan kampanye sebelum pemilu. Sedangkan partisipasi yang non-konvensional merupakan semua kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara biasa yang juga mempengaruhi hasil akhir namun tidak terikat pada norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat partisipasi politik yang dilakukan oleh para seniman di Kota Palu pada Pemilu Kota Palu pada tahun 2015 merujuk pada 5 bentuk partisipasi politik yang dijelaskan oleh Huntington dan Nelson dan lebih spesifik merujuk pada bentuk partisipasi politik konvensional yang dijelaskan oleh Mas'ood.

### **2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Berangkat dari dalil bahwa partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam demokrasi dengan asumsi bahwa dengan berpartisipasi dalam politik seseorang dapat mempengaruhi dan memiliki hak untuk ikut ambil bagian dalam keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu kesadaran atau keinginan untuk terlibat dalam politik bagi warga negara wajib

hukumnya, apabila warga negara tersebut ingin suara dan kepentingannya dapat dipenuhi. Beberapa faktor-faktor yang diasumsikan mempengaruhi tinggi rendahnya dorongan atau keinginan warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam politik adalah kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah (Surbakti, 2007).

Menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah kesadaran seorang warga negara terhadap hak dan kewajibannya seperti hak politik, hak ekonomi, hak mendapat jaminan sosial dan hak hukum. Faktor kesadaran politik juga berkaitan dengan pengetahuan seorang warga negara tentang politik dan lingkungan sekitarnya serta perhatiannya terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Sementara, faktor kepercayaan terhadap pemerintah bermaksud bagaimana penilaian dan apresiasi seorang warga negara terhadap pelaksanaan pemerintahan serta dampak yang dirasakannya atas kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kepercayaan dalam hal ini juga bermakna apakah seorang warga negara dapat mempercayai pemerintah dan apakah seorang warga negara dapat mempengaruhi pemerintah atau tidak (Surbakti, 2007).

Selain dua faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada faktor lain yang berdiri sendiri yang menentukan tinggi rendahnya kedua faktor sebelumnya. Faktor tersebut ialah status sosial (kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain), afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi (Surbakti, 2007).

Senada dengan penjelasan Surbakti mengenai faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya faktor kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yussof dan Yusran (2007), menjelaskan beberapa faktor yang secara umum dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang.

1. Tingkat Pendidikan
2. Jenis Kelamin
3. Status Sosial
4. Status dan Situasi Politik (pengaruh ideologi dan peranan partai politik serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik).

Sementara Weimer (dalam Mas'ood, 2011) memaparkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal.

1. Modernisasi

Modernisasi yang terjadi disegala bidang, dapat berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatnya kemampuan baca tulis, pendidikan yang semakin membaik dan media massa atau media komunikasi yang semakin berkembang secara luas.

2. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Berubahnya struktur kelas dalam lingkungan sosial merupakan akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas di era industrialisasi dan modernisasi.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Gagasan-gagasan baru yang berupa ideologi seperti nasionalisme, liberalisme dan lain-lain, menimbulkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam politik.

4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik

Persaingan untuk memperebutkan kekuasaan yang terjadi antara pemimpin-pemimpin politik seringkali menggunakan cara mencari dukungan massa sehingga dapat menimbulkan partisipasi politik pada masyarakat.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Semakin meluasnya keterlibatan pemerintah hampir diseluruh aspek kehidupan warga negara menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Kemudian, Milbart (dalam Zulpany, 2017) menjelaskan beberapa faktor utama yang mendorong keterlibatan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, antara lain :

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal.

2. Karakteristik kepribadian seseorang.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

3. Karakteristik sosial seseorang.

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang terhadap politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

4. Keadaan Politik.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik totaliter.

Lingkungan politik yang sering diisi aktivitas-aktivitas politik brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

#### **2.2.4. Konsep Perilaku Memilih**

Membahas soal faktor atau alasan terlibatnya warga negara dalam politik, tidak terlepas juga dari pembahasan soal perilaku memilih. Studi tentang perilaku memilih dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat yang cenderung demokratis, yang mana baik konstituen maupun masyarakat biasa secara bebas dapat memilih kandidat yang berkontestasi dalam pemilu baik individu maupun partai. Perilaku pemilih, oleh Mariam Budiarjo (2008) didefinisikan sebagai kegiatan individu atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam dunia politik, dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara garis besar, perilaku pemilih dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Perilaku Memilih Rasional**

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih jenis ini adalah faktor internal dari pemilih itu sendiri. Kedudukan pemilih dalam hal ini dapat dikatakan independen karena memiliki kebebasan untuk memilih kandidat atau partai tertentu. Pemilih kategori ini sebagian besar menentukan pilihannya berdasarkan hasil pikir dan penilaian mereka terhadap objek politik tertentu.

##### **2. Perilaku Memilih Emosional**

Faktor-faktor yang menyebabkan individu atau kelompok dalam kategori ini untuk memilih kandidat atau partai yang berkontestasi dalam politik paling sering adalah faktor lingkungan. Yang mana faktor lingkungan tersebut seperti sosiologis, strukturalis, ekologi maupun sosiopsikologis.

Surbakti (2007) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan oleh individu dengan cara memberikan suara atau tidak terhadap kandidat tertentu yang ikut dalam kontestasi politik.

Secara teoritis perilaku pemilih dapat dijabarkan dalam tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang berawal dari studi tentang perilaku pemilih ini berangkat dari asumsi bahwa keterlibatan seseorang dalam politik ditentukan oleh karakteristik sosiologis seperti keluarga, kelas sosial, agama dan kelompok atau secara umum dapat dikatakan berdasarkan faktor identitas. Dalam kacamata model sosiologis, partisipasi politik bukan hanya merupakan pengalaman pribadi, namun juga merupakan pengalaman secara kolektif. Keterlibatan seseorang dalam politik cenderung mengarah atau mengacu pada lingkungan sosial tempat seseorang tersebut menetap. Pendekatan sosiologis awalnya dilahirkan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University yang berasal dari hasil penelitian sosiologi yang

mereka lakukan (Roth, 2008). Dalam pendekatan sosiologis memandang masyarakat hidup dalam suatu sistem atau tata nilai yang memiliki kesadaran yang kuat mengenai status sosial yang mereka miliki. Hal tersebut berarti dalam sistem masyarakat dipandang memiliki sifat hirarkis. Para ahli yang mengembangkan pendekatan ini mempercayai bahwa untuk memahami perilaku politik individu maka harus memahami karakteristik sosial dari masyarakat itu sendiri. Karena mereka mempercayai bahwa dalam masyarakat sudah memiliki sistem atau tata nilai yang sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga membentuk karakteristik sosial. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi perilaku pemilih yang menggunakan pendekatan sosiologis yaitu (Gaffar, 1992):

- a. Pendidikan
- b. Jabatan/Jabatan
- c. Jenis Kelamin
- d. Usia

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan pengelompokan-pengelompokan sosial dan karakteristik sosial memiliki signifikansi yang besar menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan-pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi agama, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok okupasi dan lain sebagainya serta kelompok non-formal seperti keluarga, pertemanan, maupun kelompok-

kelompok kecil lainnya dipahami sebagai sesuatu yang vital untuk memahami perilaku pemilih masyarakat pada saat pemilu. Dalam kajian perilaku pemilih, Gerald Pomper (dalam Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat, 2015) secara spesifik membagi ke dalam 2 variabel yaitu predisposisi (kecendrungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Apakah preferensi politik anak dipengaruhi oleh preferensi politik ayah dan ibu, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa kelas sosial, karakteristik demografis, agama yang dianut dan sebagainya juga mempengaruhi perilaku pemilih individu dalam kontestasi politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwight King dan Anies Baswedan menyimpulkan bahwa faktor politik aliran atau orientasi agama masih menentukan pilihan-pilihan politik masyarakat Indonesia. Dwight King dalam kajiannya melakukan perbandingan pada Pemilu 1955 dan Pemilu 1999, menemukan bahwa ada dua pembelaan yang terjadi pada dua Pemilu tersebut yaitu partai-partai dengan aliran politik santri dan abangan, dan juga pembelaan antara santri modern dan tradisional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anies Baswedan menemukan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara faktor orientasi agama dengan perilaku pemilih pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Hal ini ditunjukkan dengan adanya basis-basis pemilih antara partai Islam, nasionalis, maupun Kristen. (Yustiningrum dan Ichwanudin, 2015).

## 2. Pendekatan Psikoogis

Dalam pendekatan psikologis, dua disiplin ilmu digabungkan yaitu ilmu psikologis dan ilmu politik. Psikologis merupakan ilmu sifat yang mempelajari fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia, yang mana setiap gerak gerak atau tingkal laku manusia baik secara individu maupun dilingkungan masyarakat dipengaruhi oleh akalnya. Sementara ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari aspek tingkal laku dari masyarakat secara kolektif sehingga sangat dekat hubungannya dengan ilmu psikologis. Pendekatan ini kemudian lahir akibat ketidakpuasan para ahli oleh pendekatan sosiologis yang dianggap sulit untuk diukur. Kesulitan untuk mengukur pendekatan sosiologis menurut para ahli tersebut adalah ketepatan mengukur sejumlah indikator seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan lain sebagainya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas perilaku pemilih melalui pengembangan konsep sikap dan sosialisasi manusia berdasarkan ilmu psikologis. Menurut Greenstein (dalam Jaringan Pendidikan Pemilu Rakyat, 2015) ada 3 indikator fungsi sikap yang mempengaruhi perilaku pemilih seseorang dalam politik yaitu:

a. Sikap Merupakan Fungsi Kepentingan

Dalam hal ini penilaian terhadap kandidat atau partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan pemilih.

b. Sikap Merupakan Fungsi Penyesuain Diri

Pada indikator ini seorang pemilih bersikap tertentu sesuai dengan keinginannya sendiri untuk memiliki sikap yang sama atau tidak dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.

c. Sikap Merupakan Fungsi Eksternalisasi dan Pertahanan Diri

Arti dari sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri adalah upaya seseorang untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berupa mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri. Tetapi sikap bukanlah suatu hal yang cepat terjadi, melainkan terbentuk melalui proses yang tidak singkat yang didapatkan sejak lahir sampai dewasa. Sikap politik seseorang terbentuk melalui tiga tahapan yaitu; (1) tahap dimana keluarga yang menjadi penentu sikap seseorang pada usia anak; (2) kemudian, tahap dimana faktor diluar keluarga seperti lingkungan sekitar, (3) dan terakhir tahap dimana faktor yang menentukan sikap politik seseorang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok acuan seperti lingkungan kerja, tempat ibadah, partai politik dan asosiasi lainnya.

Dalam pendekatan ini, perilaku memilih masyarakat diasumsikan terjadi akibat adanya ketertarikan terhadap politik serta memiliki pengaruh atau kedekatan emosional terhadap calon atau partai yang akan dipilih. Masyarakat dalam kacamata model psikologis dianggap memiliki keyakinan bahwa keputusan atau tindakan yang dilakukan

oleh masyarakat dalam politik dapat merubah atau memperbaiki keadaan. Dalam model pendekatan psikologis menurut (Roth, 2009) ada tiga hal yang menjadi perhatian utama, yaitu: (1) persepsi penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; dan (3) identifikasi partai atau partisanship. Lanjut Roth menjelaskan bahwa orientasi pada tema-tema atau isu-isu yang diusung atau yang akan diperjuangkan oleh kandidat maupun partai yang berkontestasi dalam politik merupakan rumusan dari pengaruh jangka pendek yang diperkenalkan oleh pendekatan ini. Adapun syarat-syarat agar isu-isu khusus tersebut dapat mempengaruhi pilihan seseorang yaitu: (1) isu tersebut harus ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif.

### 3. Pendekatan Pilihan Rasional

Menurut perspektif pendekatan pilihan rasional keterlibatan seorang warga negara dalam politik disebabkan oleh rasionalitas yang dimilikinya, dengan asumsi bahwa jika ikut berpartisipasi dalam politik akan lebih menguntungkan atau kepentingannya dapat terakomodir dibanding tidak ikut berpartisipasi dalam politik. Rasionalitas menurut Downs dalam (Roth,2009) adalah usaha guna mencapai tujuan dengan cara yang paling masuk akal. Cara yang paling masuk akal (*reasonable*) adalah alasan berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimiliki oleh

seseorang untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya dengan menggunakan sumber daya seminim mungkin. Teori pilihan rasional pertama kali dikenalkan oleh Anthony Downs yang dalam kajiannya menjelaskan bahwa salah satu elemen penting dari demokrasi yaitu Pemilu. Pemilu menurut Downs seperti sebuah pasar yang di dalamnya ada penawaran yang mana penawaran tersebut dilakukan oleh partai dengan program-program, isu-isu yang diangkat dan penawaran yang dilakukan oleh pemilih. Dalam sudut pandang penawaran dan permintaan dalam teori ekonomi, pemilih rasional hanya akan ada jika partai yang nantinya akan dipilih oleh warga negara selaku pemilih juga bertindak rasional. Sama halnya juga dengan perspektif pemilih, partai memiliki kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, yang didalamnya ada pendapatan dari pemerintah, kekuasaan, dan gengsi (Yustiningrum dan Ichwanudin, 2015). Dalam konteks Pemilu, teori pilihan rasional menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan perhitungan mengenai keuntungan didapat berdasarkan hasil keputusan untuk memilih kandidat atau partai tertentu. Menurut Downs ada 5 kriteria rasionalitas yang harus dipenuhi agar sebuah keputusan dapat dikatakan sebagai pilihan rasional. 5 kriteria rasionalitas pemilih tersebut yaitu: (1) individu dapat membuat sebuah keputusan ketika dihadapkan pada serangkaian alternatif pilihan; (2) individu dapat menyusun preferensi dirinya dengan pilihan-pilihan yang ada secara berurutan; (3)

susunan preferensi tersebut bersifat transitif, sebagai contoh individu lebih memilih alternatif A daripada alternatif B, lebih memilih alternatif B daripada memilih alternatif C, dan seterusnya. Pilihan-pilihan tersebut memiliki konsekuensi bahwa pilihan A lebih diutamakan daripada pilihan-pilihan lainnya; (4) individu akan selalu memilih alternatif yang dirasa paling mendekati pilihan utama; (5) jika pemilih dihadapkan dengan banyak pilihan di waktu yang berbeda dalam suatu lingkungan yang sama, individu akan membuat keputusan yang sama (Evans, 2004).

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok seniman Kota Palu pada pemilukada Kota Palu tahun 2015 dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik yang dijelaskan oleh Mas'ood (2008) yaitu: (1) kegiatan memilih/voting; (2) diskusi politik; (3) kegiatan kampanye; (4) bergabung dan membentuk kelompok kepentingan; dan (5) komunikasi individual kepada pejabat politik atau birokrasi. Penelitian ini juga akan fokus pada alasan dibalik partisipasi politik aktif kelompok seniman Kota Palu pada salah satu calon Kepala Daerah di Pemilukada Kota Palu tahun 2015 dengan menggunakan teori perilaku pemilih yang di dalamnya terdapat tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan sosiologis; (2) pendekatan psikologis; dan (3) pilihan rasional.

### **2.2.5 Konsep Kelompok Seni**

Seni merupakan hasil atau proses kerja dan ide manusia yang melibatkan kemampuan kreatif, kepekaan indra, terampil, kepekaan hati dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang dipandang indah, selaras, bernilai, dan lain sebagainya (Sumanto, 2006). Dalam seni, yang menjadi point utama adalah manusia, yang mana manusia adalah sebagai pencipta atau pembuat seni yang berupa karya tersebut. Manusia yang mampu menghasilkan sebuah karya berdasarkan pengertian seni diatas, disebut sebagai seniman. Dalam praktiknya seniman dalam berkarya dilakukan secara individu tidak jarang dilakukan seniman juga melakukannya dalam bentuk kelompok yang memiliki tujuan yang beragam. Karena pada dasarnya para seniman sebagai subyek atau individu (manusia) yang tidak lepas dari interaksi dengan individu lainnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Soekanto (2006) mengenai kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lainnya. Konsekuensi dari hal tersebut, manusia atau individu-individu melahirkan suatu kelompok-kelompok (Kelompok Sosial) yang didasari oleh kesamaan-kesamaan dan kepentingan bersama. Kelompok sosial menurut Soekanto (2006) merupakan himpunan manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam kebersamaan dikarenakan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya tersebut berkaitan dengan hubungan yang saling mempengaruhi dan juga adanya kesadaran untuk menolong satu sama lain. Menurut Huky (dalam Wahyudi, 2015) menjelaskan ada beberapa ciri dasar dari suatu kelompok.

- a. Kelompok selalu terdiri dari paling minimal dan terus bertambah
- b. Kelompok tidak dianggap terbentuk karena memenuhi persyaratan jumlah
- c. Interaksi dan komunikasi merupakan unsur utama suatu kelompok yang harus bersifat timbal balik
- d. Kelompok dapat bersifat sementara dan berkepanjangan
- e. Ciri kelompok dapat ditemukan dapat ditemukan dalam kehidupan binatang seperti lebah, kera dan sebagainya.
- f. Minat dan kepentingan merupakan alasan utama terbentuknya sebuah kelompok
- g. Penyebab terbentuknya kelompok dapat didasari oleh beragam alasan, dikarenakan manusia dalam situasi tertentu dituntut untuk membentuk kelompok.

Berdasarkan penejelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan individu-individu atau manusia yang memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan interaksi yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Berkaitan dengan penelitian ini, kelompok seniman dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial karena telah memenuhi syarat atau ciri-ciri kelompok yang dijelaskan sebelumnya. Selain memiliki jumlah anggota kelompok yang berjumlah banyak, kelompok seniman ini juga memiliki minat dan kepentingan bersama yang akan dicapai kedepannya.

Wujud dari kelompok seniman ini dalam berbagai bentuk seperti sanggar seni, komunitas seni, kelompok seni dan lain sebagainya.

#### **2.4 Defenisi Konseptual**

Dari penjelasan teori diatas, adapun defenisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik merupakan kegiatan warganegara preman (*privat citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
2. Bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi beberapa bagian antara lain; (1) *Kegiatan pemilihan* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara yang memberikan pengaruh terhadap hasil proses pemilihan. (2) *Lobbying* adalah tindakan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. (3) *Kegiatan organisasi* yang dimaksud adalah keterlibatan warga negara dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. (4) *Kegiatan mencari koneksi* merupakan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari pejabat-pejabat pemerintah kepada warga negara baik dalam jumlah kecil maupun besar yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. (5) *Tindakan kekerasan* yang dimaksud dalam hal ini kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-

keputusan pemerintah dengan cara menghasilkan kerugian fisik yang dirasakan oleh orang atau harta benda. Sementara ada dua jenis partisipasi politik yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional menurut Mas'ood yaitu (1) *kegiatan memilih/voting*, (2) *diskusi politik*, (3) *kegiatan kampanye*, (4) *bergabung dan membentuk kelompok kepentingan*, dan (5) *komunikasi individual dengan pejabat politik atau birokrasi*. Dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk partisipasi politik konvensional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3. Perilaku pemilih sebagai kegiatan yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan oleh individu dengan cara memberikan suara atau tidak terhadap kandidat tertentu yang ikut dalam kontestasi politik. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mengukur perilaku pemilih seseorang, yaitu: (1) *pendekatan sosiologis*; (2) *pendekatan psikologis*; dan (3) *pilihan rasional*.

## **2.5 Defenisi Operasional**

Untuk melihat bagaimana partisipasi politik kelompok seniman Kota Palu pada Pemilu Kota Palu tahun 2015 ditinjau dari bentuk-bentuk partisipasi politik yang mereka lakukan, serta alasan partisipasi aktif kelompok seniman Kota Palu pada salah satu kandidat Kepala Daerah di Pemilu Kota Palu tahun 2015 ditinjau menggunakan teori perilaku pemilih, maka dijelaskan dalam penelitian ini melalui konsep berikut.

**Tabel 2.2**  
**Variabel Indikator dan Parameter Defenisi Operasionnal**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Bentuk Partisipasi Politik	Partisipasi Politik Konvensional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat bagaimana bentuk partisipasi politik (<i>kegiatan pemilihan atau voting</i>) yang dilakukan oleh para seniman Kota Palu pada Pemilu pada tahun 2015</li> <li>- Melihat bagaimana bentuk partisipasi politik (<i>diskusi politik</i>) yang dilakukan oleh para seniman Kota Palu pada Pemilu pada tahun 2015</li> <li>- Melihat bagaimana bentuk partisipasi politik (<i>kegiatan kampanye</i>) yang dilakukan oleh para seniman Kota Palu pada Pemilu pada tahun 2015</li> <li>- Melihat bagaimana bentuk partisipasi politik (<i>bergabung dan membentuk kelompok kepentingan</i>) yang dilakukan oleh para seniman Kota Palu pada Pemilu pada tahun 2015</li> <li>- Melihat bagaimana bentuk partisipasi politik (<i>komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif</i>) yang dilakukan oleh para seniman Kota Palu pada Pemilu pada tahun 2015</li> </ul>
Alasan Partisipasi Politik	Perilaku Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melihat sejauh mana faktor (<i>sosiologis</i>) mempengaruhi perilaku memilih seniman Kota Palu pada Pemilu Kota Palu tahun 2015</li> <li>- Melihat sejauh mana faktor (<i>psikologis</i>) mempengaruhi perilaku memilih seniman Kota Palu pada Pemilu Kota Palu tahun 2015</li> <li>- Melihat sejauh mana faktor (<i>pilihan rasional</i>) mempengaruhi perilaku memilih seniman Kota Palu pada Pemilu Kota Palu tahun 2015</li> </ul>

		2015
--	--	------